

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadaan Sumber Daya Manusia: Kondisi sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias mengalami peningkatan, terutama dalam hal keterampilan. Peningkatan ini tidak hanya bergantung pada pelatihan formal, tetapi juga pada pendekatan multifaset yang mengintegrasikan pengalaman praktis, kerja sama tim, pendampingan dari pimpinan, dan inisiatif pribadi.
2. Realisasi Program Bimtek: Program Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan dinilai sangat efektif dalam meningkatkan kinerja, keterampilan, dan pengetahuan para pegawai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Bimtek yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan dan didukung oleh materi inovatif sangat efektif untuk meningkatkan kinerja. Namun, terdapat kontras antara kebutuhan dan realisasi Bimtek, di mana frekuensi Bimtek masih sangat jarang dan hanya terfokus pada periode menjelang pemilihan.
3. Kendala dalam Mengikuti Bimtek: Kendala utama yang dihadapi oleh pegawai dalam mengikuti Bimtek adalah keterbatasan anggaran untuk jumlah peserta. Selain itu, ada kebutuhan untuk pendalaman materi dan perpanjangan waktu penyelenggaraan Bimtek. Meskipun beberapa informan wawancara menyatakan tidak ada kendala, harapan untuk "lebih ditingkatkan lagi dan lebih diperbanyak materi bimtek" mengindikasikan bahwa keterbatasan akses dan relevansi materi merupakan kendala yang dirasakan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Pos Gunungsitoli , maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias, perlu melakukan beberapa perbaikan. Pertama, perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk bimtek agar jumlah peserta yang dapat mengikuti kegiatan ini menjadi lebih banyak. Saat ini, anggaran yang terbatas menjadi kendala utama sehingga tidak semua pegawai bisa mendapatkan kesempatan yang sama.
2. Perlu adanya perbaikan pada materi bimtek. Materi yang disajikan harus lebih relevan dan spesifik terhadap masalah-masalah teknis yang dihadapi di lapangan. Instansi disarankan untuk menginventarisasi masalah dari KPU di tingkat kabupaten/kota dan menyampaikan inventarisasi masalah tersebut kepada KPU pusat sebagai penyelenggara bimtek agar materi yang disampaikan lebih mendalam dan sesuai kebutuhan.
3. Pertimbangkan untuk lebih sering melaksanakan bimtek secara tatap muka (luring). Berdasarkan temuan, bimtek yang dilakukan secara daring (melalui Zoom) dinilai kurang efektif karena sulit untuk menjaga fokus dan pemahaman peserta. Pelaksanaan tatap muka dapat menciptakan interaksi yang lebih intensif, interaktif, dan berdampak signifikan pada kualitas SDM serta kinerja KPU Kabupaten Nias di masa mendatang